

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, A. (2017). *Menguak Takbir Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2014). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *CEPAT DAN MUDAH MEMAHAMI HUKUM PIDANA*. Jakarta: KENCANA.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartomo. (2010). *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Iqbal, M. (2012). *Penegakan Hukum Pidana "Illegal Fishing"*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Johnson, A. S. (2004). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantari)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta, : Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, & Arif, B. N. (2012). *Penegakan Hukum Pidana*,. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2005). *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prastowo, RB Budi. (2006). *Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi*.
- Sirajudin, Zulkaranain, & Sugianto. (2007). *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*. Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tuanakotta, T. M. (2009). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

B. Jurnal

Arisandi, *Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Trawl (Studi Kasus Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 4 No. 1, Surabaya, 2017, h. 7.
DOI: <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.195>

Arliman, Laurensius S., *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Iuridica, Vol. 11, No. 1, 2019, h. 10. DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01/Bua.6/HS/SP/III/2015.

D. Sumber Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya>, diakses tanggal 14 September 2023, pukul 12.33

BAMS EDUCATION, Illegal Fishing: Pengertian, Dampak, Peraturan, dan Sanksi, https://pasla.jambiprov.go.id/illegal-fishing-pengertian-dampak-peraturan-dan-sanksi/#Sanksi_Administratif diakses tanggal 6 Mei 2023, pukul 15.19 WIB

Gramedia Blog, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/#Pengertian_Penegakan_Hukum diakses tanggal 5 Mei 2023, pukul 9.42 WIB.

Gramedia Blog, *Pengertian & Jenis Pengendalian Sosial (Preventif, Represif, Koersif)*. https://www.gramedia.com/literasi/pengendalian-sosial/#1_Pengendalian_sosial_preventif, diakses tanggal 14 September 2023, pukul 13.23

Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai->

[upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia](#), diakses tanggal 28 Februari 2023, pukul 10.52 WIB.

Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya> diakses tanggal 12 September 2023, pukul 13.18 WIB.

WIKIPEDIA, *Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Kelautan_dan_Perikanan_Republik_Indonesia#Tugas_dan_fungsi diakses tanggal 6 Mei 2023, pukul 12.33 WIB.

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ranga Kriswanda, sebagai Subditgakkum Ditpolair
Jawa Timur